

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perluasan interdependensi dari setiap bangsa akan melahirkan sebuah fenomena baru yang terjadi dari studi hubungan antar bangsa. *Power* dan konstelasi politik merupakan fokus dari teori hubungan internasional klasik. Ini membuat perbaikan diperlukan karena keadaan global yang berubah, yang berarti kapasitas negara berubah dan batas kedaulatan negara menjadi kabur. Akibatnya, muncul pola politik baru yang mengasosiasikan kepentingan nasionalnya pada kepentingan regionalnya. Sehingga, pola politik baru ini yang akan menjadikan sebuah jalan keluar bagi pencapaian kepentingan nasional (Cahyawa, 2020).

Region sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan negara yang keberadaannya di satu kawasan, dalam hal ini kedekatan geografi tidak akan cukup dalam menyatukan sebuah negara ke dalam sebuah kawasan. Hettne dan Soderbaun, menyatakan bahwa bukan hanya kedekatan geografi saja dalam menilai sebuah regional tetapi perlu adanya sebuah dukungan dari kebudayaan, keterikatan sosial, dan sejarah yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa terciptanya sebuah regional bukan hanya dari interaksi dan kerja sama antar negara saja tetapi, melainkan harus dengan pendekatan lainnya (Rizal Sukma, 2003).

Seperti contoh dari sebuah pembentukan kerja sama regional yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), di mana pembentukan kerja sama ini bukan hanya dengan pendekatan kedekatan geografi saja tetapi, dengan

memiliki latar belakang sejarah yang sama, serta berusaha mempromosikan pengembangan budaya, kemajuan sosial, dan pertumbuhan ekonomi di sebuah Kawasan Asia Tenggara. Dari menggunakan beberapa pendekatan yang akhirnya menjadikan (ASEAN) sebagai sebuah organisasi kerja sama Regional yang berhasil diantara negara berkembang lainnya (serafica gischa, 2022).

Hettne, memberikan 5 tingkatan tahapan di dalam regionalisme: pertama *Simple Geographic Unit of States*. Di mana di dalam tahapan ini, antara negara di dalam regional tidak ada interaksi dan kerja sama yang rutin, dan apabila ada ancaman datang maka kerja sama akan tercipta tetapi, hanya sebatas ancaman itu datang; kedua *Set of Social Interactions*. Pada tahapan ini, telah terjadi sebuah interaksi dari tiap negara, namun interaksi yang ada hanya berupa sebuah norma institusi tidak formal; ketiga *Collective Defense Organisation*. Tahapan ini negara mulai saling bersekutu dengan negara tetangga atau negara lain yang memiliki pemikiran yang sama dalam melawan ancaman yang sama, terjadinya sebuah perjanjian yang mengikat antara negara-negara, dan kombinasi kekuatan bukan penggabungan ataupun peleburan; keempat *Security Community*. Dalam tahapan ini terjadinya sebuah interaksi antara masyarakat sipil negara di kawasan, lalu terciptanya sebuah hubungan yang damai antar negara dalam kawasan, dan memiliki kekuatan untuk memilih menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah; kelima *Region State*. Dalam kondisi terakhir ini, kawasan telah memiliki sebuah identitas bersama yang berbeda dari kawasan lain, kawasan memiliki kapabilitas bersama, dan kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kesatuan(Tjarsono, 2013).

Dalam menciptakan suatu kerja sama regional di Asia Timur, telah menjadi sebuah wacana yang sering di canangkan. Walaupun dengan latar belakang sejarah diantara negara-negara Asia Timur akan sulit dalam menciptakan sebuah regionalisme antara negara-negara Asia Timur. Maka, wacana pembentukan regionalisme wilayah Asia Timur perlu adanya keterlibatan negara-negara lain seperti, negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Wilayah Asia Timur laut, merupakan sebuah wilayah yang memiliki sensitivitas politik dan keamanan pasca perang dunia II serta perang dingin sampai saat ini masih mewarnai interaksi antar negara (Saputro, 2015)

Dalam pembangunan institusi regionalisme Kawasan Asia Timur bukanlah pekerjaan yang cukup mudah. Namun, mengonstruksikan sebuah identitas regional Kawasan Asia Timur menjadi sebuah pekerjaan yang sangat sulit apabila dibandingkan dengan kawasan lain, hal ini diakibatkan oleh masyarakat yang cenderung terlalu homogen. Dan alasan lain sulitnya dalam pembentukan identitas regionalisme adalah adanya sebuah persaingan tiap negara yaitu dalam memperlihatkan peran dominan dalam kekuatan regional di kawasan, hal ini diperlihatkan oleh negara Jepang serta negara Cina, persaingan ini dilakukan sejak adanya wacana pembentukan regionalisme Asia Timur (Saputro, 2015).

Demi mencapai sebuah kepentingan nasional, suatu negara diperlukan adanya kestabilan regional. Meskipun banyak faktor lain yang akan mempengaruhi suatu kepentingan nasional seperti faktor internal maupun faktor eksternal. Kestabilan regional dianggap penting dalam pencapaian kepentingan nasional negara, karena dapat mempengaruhi keamanan dan kepentingan nasional suatu

negara. Maka dari itu, suatu negara perlu adanya sebuah kerja sama regional dalam menjaga keamanan regional demi kepentingan nasionalnya.

Keamanan regional dianggap penting dalam pendekatan keamanan sebab, pertama, keamanan regional merupakan sebuah elemen dalam pembentukan sebuah keamanan internasional atau juga sebuah konflik internasional. Kedua, keamanan regional berhubungan serta dapat mempengaruhi dari keamanan nasional suatu negara dalam kawasan regional. Ketiga, keamanan regional berfungsi untuk membantu dalam menganalisis keberlangsungan suatu kawasan regional, sehingga mengapa suatu kawasan dapat eksis dan kemungkinan dalam pengupayaan suatu negara dalam melanggengkan kawasan regionalnya (Rizal Sukma, 2003).

Menciptakan stabilitas kawasan, dari sebuah ancaman tersebut dapat tercipta sebuah gambaran yaitu dua sisi mata uang. Dimana ancaman dapat mengganggu stabilitas kawasan tetapi, disisi lain dari ancaman akan dapat menciptakan sebuah kerja sama regional dalam upaya menghilangkan sebuah ancaman. Terdapat 4 buah kategori yang dapat mengancam keamanan regional atau stabilitas keamanan. Pertama, *balance of contest* yang merupakan sebuah ancaman yang datang dari anggota negara kawasan dalam keinginannya untuk menguasai beberapa aspek tertentu seperti sumber daya alam, dan hegemoni yang menjadikan munculnya sebuah perlombaan. Kedua, *grass life conflicts* yang merupakan ancaman dari sebuah konflik lokal dalam memperebutkan sebuah wilayah di kawasan. Ketiga, *intra state conflicts* ancaman yang berasal dari internal yaitu menyangkut konflik etnik dan lainnya. Keempat, *transnasional threats* berupa sebuah ancaman non tradisional seperti isu lingkungan, ketidakadilan, ekonomi,

politik, sosial, kesehatan, serta penyelesaian imigran. Keempat inilah yang dapat mengancam kestabilan keamanan regional, yang di mana dapat mempengaruhi dari sebuah tujuan suatu negara (Tjarsono, 2013).

Kondisi keamanan yang stabil merupakan sebuah syarat untuk bisa terwujudnya suatu tujuan negara. Situasi dan kondisi keamanan yang ada di dalam suatu negara bergantung terhadap kondisi keamanan yang berada dilingkungan, kawasan, atau regional. Situasi keamanan regional atau internasional akan berdampak bagi keamanan domestik di suatu negara. Disisi lain stabilitas keamanan regional juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepentingan ekonomi, sumber daya alam, dinamika situasi keamanan, dan integrasi kawasan (Marga taufiq, 2013).

Pengaruh penting dalam menjaga kestabilan keamanan regional salah satunya adalah kebijakan pertahanan suatu negara. Kebijakan pertahanan di definisikan oleh Hedley Bull, yang menyatakan bahwa kebijakan pertahanan merupakan sebuah seni atau ilmu dalam mendapatkan tujuan tertentu di wilayah berkonflik. Strategi militer berhubungan erat dengan perencanaan dan pelaksanaan *mobilitas power* serta mengelabui musuh. Keamanan merupakan sebuah aspek penting dalam memperjuangkan kedaulatan suatu negara, wilayah, dan rakyat (Bull Hedley, 1968). Maka negara diharuskan untuk memenuhi sebuah aspek yang akan mendukung pertahanan negaranya, terutama dalam hal pertahanan militer agar suatu negara dapat mempertahankan diri dari suatu kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup negaranya.

Jepang merupakan negara yang berada di kawasan Regional Asia Timur, yang mana kawasan tersebut penuh sekali dinamika yang terjadi antara hubungan anggota-anggotanya, dinamika tersebut yaitu meliputi sengketa teritorial, konflik masa lalu dan lainnya. kawasan Regional Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang memiliki sebuah titik strategi yang mana setiap negara-negara besar memiliki kepentingan, bertemu dalam satu kawasan. Cina, Taiwan, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara negara-negara ini berusaha untuk merebut pengaruhnya baik dibidang politik, dan maupun ekonomi (Najeri & Syahrin, 2018).

Perkembangan teknologi dan ekonomi yang begitu pesat terjadi di kawasan Regional Asia Timur. Regional ini terdapat beberapa negara maju salah satunya seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Cina. Beberapa negara tersebut sangatlah terkenal diakibatkan dengan kemajuan ekonomi yang pesat, bahkan dengan kepesatan dalam membangun ekonomi dan militer negaranya, negara-negara tersebut selalu melakukan sebuah persaingan. Baik itu persaingan ekonomi, militer, dan budaya. Persaingan-persaingan inilah yang menjadikan kestabilan di kawasan Regional Asia Timur terkadang mengalami ketidakstabilan.

Salah satu jiwa persaingan tertinggi dalam kawasan Regional Asia Timur adalah Cina, Cina berasal dari Kawasan Asia Timur yang telah memiliki sebuah jumlah penduduk yang sangat tinggi. Dalam perkembangannya, Cina selalu dikagumi oleh seluruh dunia akibat dari akselerasi yang ditunjukkan oleh Cina dari berbagai bidang. David Shambaug menyatakan bahwa pola interaksi yang kompleks kini telah menjadi sebuah ciri dari hubungan internasional di Kawasan Asia selama setengah abad yang kemudian kini dipengaruhi oleh peningkatan

kekuatan ekonomi, militer, dan politik Cina. hal ini menggambarkan bahwa kebangkitan kekuatan Cina di kawasan Regional Asia Timur, dapat mengubah anggapan orang terhadap Cina yang mampu menyaingi dominasi AS dengan diperlihatkannya kekuatan ekonomi Cina menjadi raksasa (David Shambaugh, 2006). Terlihat memungkinkannya sebuah pergeseran kekuatan dengan berbagai macam dampak yang ditimbulkannya. Akibatnya, kawasan Regional Asia Timur sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat klasik. Masalah muncul karena upaya untuk merespons dan mengelola lahirnya sebuah kekuatan baru, serta selalu terlibatnya suatu konflik yang dilakukan Cina dapat menyebabkan sebuah hambatan dalam perkembangan hubungan antar negara-negara.

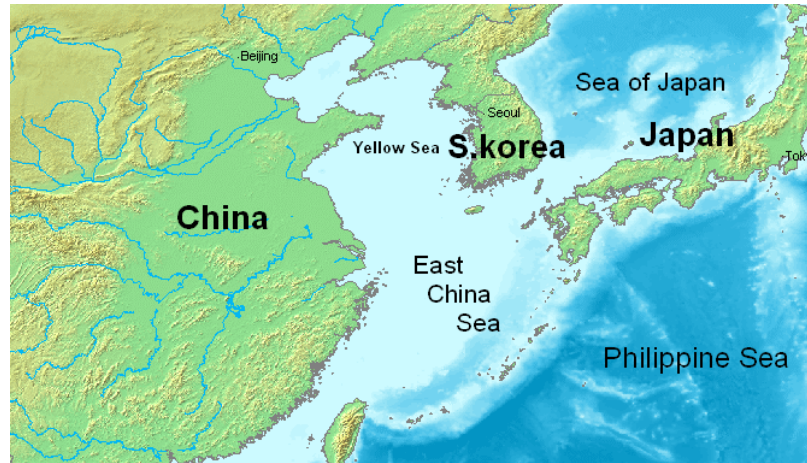
Bahkan dalam wacana pembentukan regionalisme di kawasan Regional Asia Timur kedua negara terus melakukan persaingan kepemimpinan. Jepang memiliki alasan tersendiri dari persaingan ini, yaitu sebagai kekuatan utama di kawasan dalam persaingan hegemoni regional terutama dengan Cina. Kekuatan Cina sangatlah pesat dalam kemajuannya diakibatkan sebuah kemajuan ekonominya yang dinilai fantastis, dari kemajuan yang dimiliki Cina menjadikan sebuah nilai lebih untuk Cina dalam memodernisasikan dan membangun kekuatan militer. Dari kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, menjadikan posisi diplomatik Cina sangat ditakuti oleh negara tetangga seperti Taiwan, Korea Selatan, dan bahkan Jepang (Erwinsyah, 2011).

Hubungan antara Jepang dan Cina renggang setelah kepemilikan senjata nuklir yang dilakukan oleh Cina, yang kemudian uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Cina mengakibatkan menariknya bantuan finansial yang dilakukan

oleh Jepang. Latar belakang sejarah yang dimiliki Jepang dari hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki akibat jatuhnya bom atom, sehingga Jepang bereaksi keras terhadap persenjataan nuklir. Bukan hanya itu, Cina secara berkala melakukan peningkatan besar-besaran terhadap kapabilitas militernya yaitu dengan pembaruan persenjataan, pengembangan teknologi militer, meningkatkan angkatan militer, dan sering melakukan Latihan militer (The New York Times, 1964).

Perkembangan terbaru menyatakan bahwa Cina telah mengungguli cadangan devisa terhadap Jepang, sehingga perekonomian Cina semakin kuat yang menjadikan Cina menaikkan anggaran pertahanannya. Modernisasi yang dilakukan Cina yaitu profesionalisme pasukan dan modernisasi alat-alat militer terus diupayakan. Kemandirian pemenuhan peralatan militer yang dilakukan Cina yaitu, dengan pemberdayaan dan pembinaan terpusat industri militer. Dibarengi dengan Cina yang selalu mengutamakan sebuah inovasi dalam perkembangan teknologi militernya, baik itu datang dari timur maupun dari barat. Upaya ini tidak begitu sulit untuk Cina dikarenakan Cina telah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dengan tingkat Pendidikan yang sangat memadai (Erwinsyah, 2011).

Sumber: (Center for Strategic and International Studies)



Gambar 1. 1 Gambar peta Laut Cina Timur

Salah satu kawasan yang ada di dalam Regional Asia Timur yang menjadi pusat perhatian yaitu, dengan berbagai macam dinamika konflik yang ada adalah Kawasan Laut Cina Timur. Hal ini terjadi disebabkan bertemunya beberapa negara maju yang langsung berbatasan di laut tersebut. Laut Cina Timur membentang ke arah Timur hingga sampai pada Kepulauan Ryuku, lalu terbentang ke arah Utara sampai pada Pulau Kyusu yang merupakan pulau utama Jepang paling Selatan, dan terbentang sampai Barat Laut menuju Pulau Cheju yang berada di lepas pantai Korea Selatan, serta Laut Cina Timur terbentang menuju Barat sampai Cina. Laut Cina Timur merupakan wilayah dengan produktifitas kehidupan laut yang sangat tinggi. Di Laut Cina Timur telah aktif terjadi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Cina, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Di samping itu, telah ditemukan adanya sebuah cadangan minyak bumi dan gas yang terkandung di bawah zona *continental shelf*. Selain menjadi sebuah lintasan pelayaran lokal yang masuk dan keluar Pelabuhan Cina dan Korea, Laut Cina Timur juga berfungsi untuk sebagai

jalur utama pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Pelabuhan Jepang dan Pelabuhan Pasifik lainnya. Di dalam Laut Cina Timur terdapat tiga Pelabuhan utama yaitu Shanghai di Cina, Nagasaki di Jepang, dan Chin-Lung di Taiwan (Lafond, 2023).

Dinamika konflik yang terjadi di Wilayah Laut Cina Timur menjadikan timbulnya sebuah ketidakstabilan kawasan Regional Asia Timur. Salah satu konflik yang ada yaitu konflik sengketa maritim. Michael Swaine mengatakan konflik sengketa maritim merupakan satu-satunya konflik yang menciptakan ketidakstabilan di Wilayah Laut Cina Timur. Perselisihan Cina dengan negara-negara lain di wilayah Laut Cina Timur mengenai kedaulatan teritorial dan klaim sumber daya di Laut Cina Timur merupakan salah satu kategori konflik sengketa maritim. Serta perselisihan aktivitas militer angkatan laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan Cina dengan melakukan operasi dan meningkatkan kehadirannya angkatan laut *People's Liberation Army Navy* (PLAN) di perairan sensitifitas di dekat negara-negara lain. Inilah yang menjadikan meningkatnya sebuah kekhawatiran dari negara-negara tetangga Cina salah satunya Jepang (Swan, 2013).

Hingga saat ini setelah dikeluarkannya sebuah kebijakan yang dilakukan Cina yaitu kebijakan yang dinamakan *East China Sea Air Defense Identification Zone* (ECS ADIZ), yang di kemukakan oleh juru bicara departemen pertahanan nasional Cina yaitu Gang Yansheng, merupakan sebuah konflik maritim yang masih terjadi di Kawasan Laut Cina Timur saat ini. ADIZ sendiri merupakan sebuah kebijakan dalam mengidentifikasi sistem pertahanan udara suatu negara yang terbentang dari teritorial negara sampai lautan bebas. Bukan hanya Cina yang

menetapkan ADIZ sebagai perlindungan kepentingan nasional dan pengaturan keamanan di ruang udara, tetapi Amerika dengan Canada juga telah menerapkan ADIZ mereka (Sari, 2013).

Perkembangan dari sebuah praktik ADIZ ini dilandasi dengan sebuah hukum kebiasaan internasional, tetapi dalam konteks ini Cina dengan kebijakan ECS ADIZnya telah melanggar hukum internasional karena dalam penerapannya Cina melakukan kebijakan hanya dengan sepihak, dan melakukan di ruang udara di atas kepulauan Senkaku atau Diaoyu yang mana berdasarkan *status quo* terakhir berada di dalam kebijakan ADIZ Jepang. Di sisi lain Jepang telah mengeluarkan kebijakan ADIZ pada tahun 1969 tanpa adanya sebuah penentangan dari pihak Cina. Dalam sengketa teritorial ini, Jepang dan Cina sama akan mengancam melakukan penyelesaian dengan menggunakan kekuatan militer dalam melindungi kedaulatan masing-masing negara (Sari, 2013).

Persengketaan pulau antara Jepang dan Cina mengenai kepemilikan pulau Senkaku atau Diaoyu, merupakan salah satu alasan munculnya sebuah ketegangan yang terjadi di Kawasan Laut Cina Timur. Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan kepulauan yang berada dalam Kawasan Laut Cina Timur, atau sebelah Selatan negara Jepang. Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan beberapa pulau yang berada di Kota Ishigaki, Prefektur Okinawa, yang meliputi Kepulauan Uotsuri, Kitakojima, Minamikojima, Kuba, Taisho, Okinokitaiwa, Okinominamiwa, dan Tobise. Pemerintah Jepang telah memiliki sebuah landasan hukum dalam memperkuat kepemilikannya dari kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang. Ini bermula setelah berakhirnya perang dunia 2, yang mana perjanjian perdamaian San Francisco telah

menempatkan bahwa kepulauan Senkaku berada di bawah administrasi Amerika Serikat yaitu sebagai bagian dari Okinawa, Lalu pada tahun 1977 kepulauan Senkaku dimasukkan oleh Amerika Serikat ke dalam perjanjian pengembalian Okinawa pada Jepang sebagai bagian dari wilayah yang hak administratifnya dikembalikan kepada Jepang. Serta tidak menentanginya pemerintah Cina terhadap kedaulatan Jepang atas kepulauan Senkaku selama kurang lebih 75 tahun (Ministry Of Foreign Affairs Of Japan, 2016).

Serta Cina telah gencar mengirimkan *China Coast Guard* di daerah perairan dekat dengan kepulauan Senkaku, bukan hanya itu Cina sering melakukan Latihan militernya di sekitar daerah Taiwan pada bulan Agustus. Hal ini menjadikan terjadinya ketegangan antara Jepang dan Cina. Tak lama ini Cina telah meluncurkan rudal balistik yang mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang (Johnstone, 2022).

Seminggu sebelum dikeluarkannya sebuah kebijakan baru Jepang, Cina telah gencar melakukan sebuah serangan di sekitar pulau Senkaku atau pulau Diaoyu yang diklaim oleh Cina. Serta Cina sering mendatangkan pasukan militernya di dekat perbatasan Cina dan Jepang. Di sisi lain, keberanian Rusia dalam menginvasi Ukraina dapat memicu sebuah keberanian Cina untuk melakukan penyerangan terhadap Taiwan, dan menimbulkan sebuah kekhawatiran terhadap keterlibatan Jepang dalam konflik antara Cina dan Taiwan. Inilah yang menjadikan perlu adanya sebuah kebijakan baru yang dilakukan Jepang, perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan dalam debat politik pada bulan Oktober 2021 “*We have to prepare for realistic possibilities to protect our people*”. Fumio Kishida menyatakan pasukan *Japan Self-Defense Forces* (JSDF) bukan hanya diperkuat

dalam urusan pertahanan Jepang saja, tetapi melainkan memberikan fasilitas kepada pasukan (JSDF) untuk mendapatkan kemampuan dalam menyerang fasilitas militer di wilayah musuh sebagai upaya Jepang dalam mencegah musuh (Felix K. Chang, 2023).

Hal ini memicu Jepang dalam mengeluarkan sebuah dokumen strategi yang bernama *National Security Strategy* (NSS). (NSS) dirilis pada tahun 16 Desember 2022 yang berbarengan dengan keluarnya dokumen strategi baru Jepang yaitu *National Defense Strategy* (NDS) dan *Defense Buildup Program* (DBP), keluarnya kebijakan baru Jepang di latar belakang oleh kondisi keamanan yang akut saat ini, terutama akibat dari invasi Rusia terhadap Ukraina, serta ketegangan di selat Taiwan, dan ambisi nuklir dan rudal Korea Utara yang lebih provokatif. (NSS) merupakan transformasi yang sangat dramatis yang dikeluarkan oleh Jepang dalam mengangkat kebijakan keamanan nasional serta menggambarkan meningkatnya sebuah persepsi ancaman di benak masyarakat Jepang (Hideshi, 2023).

Namun, transformasi dramatis ini bukan mengenai prinsip dan kebijakan mendasar, tetapi mengenai pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang tercantum dalam dokumen strategi. Oleh karena itu, kebijakan keamanan nasional Jepang bukanlah suatu perubahan yang mendasar namun merupakan percepatan dari Tindakan sebelumnya, yang dipicu oleh memburuknya lingkungan keamanan saat ini. dalam pengertiannya, transformasi dramatis bukanlah sebuah revolusi melainkan sebuah evolusi dengan lompatan besar (Hideshi, 2023).

Dokumen strategi (NSS) ini bukan berarti sebuah kebijakan yang baru di publikasi oleh pemerintah Jepang tetapi, dokumen strategi (NSS) merupakan sebuah pembaharuan dari dokumen strategi (NSS) tahun 2014. Dengan latar belakang meningkatnya sebuah ancaman terhadap masyarakat Jepang, menjadikan pemerintah Jepang untuk mengubah dokumen strategi (NSS) 2014 menjadi yang terbaru pada tahun 2022. Perubahan terjadi karena mengingat lingkungan keamanan Indo-Pasifik yang berubah dengan cepat. Jepang berusaha untuk mengkoordinasi perencanaan keamanan dan pertahanan nasional ke tingkat yang lebih besar, yang mana hal ini akan memfasilitasi transformasi jangka Panjang dalam kebijakan keamanan Jepang yang akan mencapai tujuan tersebut. Kemudian memberikan dampak besar baik dalam tahap Jepang, kawasan, regionalisme, dan bahkan Indo-Pasifik sendiri (IISS, 2023).

Perbedaan yang mendalam antara dokumen strategi NSS Jepang tahun 2014 dengan dokumen strategi NSS Jepang tahun 2022. Memiliki tiga perbedaan mendalam. Yang pertama; perubahan paradigma keamanan, perubahan ini berupa sebuah tambahan paradigma pada tahun 2014, paradigma keamanan Jepang hanya berupa keamanan tradisional kemudian, pada tahun 2022 paradigma keamanan Jepang bertambah yaitu dengan memfokuskan pada paradigma keamanan non tradisional. Yang kedua; peningkatan peran Jepang dalam keamanan regional, dalam hal ini usaha Jepang dalam memainkan sebuah perannya terhadap keamanan regional dengan kerja sama yang dilakukan Jepang dengan Amerika beserta ASEAN namun, pada dokumen strategi tahun 2022 Jepang meningkatkan kerja samanya dengan negara-negara sepemikiran dengan Jepang di Kawasan Asia-

Pasifik. Ketiga; peningkatan kapasitas pertahanan Jepang, pada dokumen 2014 kapasitas yang diambil Jepang menekankan pentingnya sebuah kapasitas pertahanan yang efektif namun, tetap proporsional. Pada dokumen 2022 Jepang telah meningkatkan kapasitas pertahanannya dengan meningkatkan anggaran pertahanan Jepang serta memodernisasi ketertinggalan militer Jepang untuk menghadapi semua ancaman Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022d).

Didalam dokumen strategi (NSS) menyatakan bahwa *“as a nation in the Indo-Pacific region, Japan will further promote efforts to realize a FOIP by deepening cooperation with like-minded countries through the Japan-U.S. Alliance as a cornerstone and through efforts such as the Japan-U.S.-Australia-India (Quad) partnership. To this end, Japan will strive to make the vision of a FOIP more universal around the world . . . and expand efforts to ensure maritime security.”*. *Free and Open Indo–Pacific* (FOIP) merupakan visi strategi yang dikemukakan oleh Jepang yang bertujuan untuk mendorong tatanan berbasis aturan, kebebasan navigasi, dan pasar terbuka di Kawasan Indo Pasifik. Konsep ini pertama kali diadopsi oleh mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2016, yang kemudian berlanjut diadopsi kembali oleh negara lain yaitu Amerika dan Australia. (FOIP) dipandang sebagai respons terhadap semakin besarnya pengaruh Cina di Kawasan Asia Timur (Hideshi, 2023).

Dalam mewujudkan sebuah konsep (FOIP), Jepang berusaha untuk memajukan kerja sama keamanan internasional dengan jaringan aliansi yang berpusat pada Amerika Serikat, khususnya dalam bidang keamanan maritim. Seiring dengan kemampuan dan peran Jepang, hubungan antara Jepang dan sekutu

regional Amerika Serikat lainnya diharuskan untuk diperkuat sehingga jaringan aliansi lebih kuat. Jaringan aliansi ini merupakan sebuah arsitektur keamanan Regional Indo-Pasifik karena hal akan membawa stabilitas kawasan (Hideshi, 2023).

(FOIP) merupakan tujuan utama dalam isi dari dokumen strategi (NSS) Jepang. Jepang berniat untuk memainkan peran regional yang lebih besar sejak kebijakan pemerintah Abe. Maka strategi yang terdapat di dalam (NSS) yaitu strategi Indo-Pasifik dan (FOIP) memberikan terhadap Jepang tanggung jawab dan kemitraan yang lebih besar di kawasan ini (Singh, 2021). Meskipun (FOIP) merupakan visi strategi utama dalam dokumen (NSS) tersebut tetapi, Jepang akan menggunakan dokumen strategi (NSS) ini dalam semua lini baik itu dalam kawasan, regional atau bahkan Indo-Pasifik. Ini dibuktikan dengan keluarnya dokumen strategi (NSS) 2022 sebagai respons Jepang terhadap ancaman dan keaktifan Cina di Laut Cina Timur.

Pada bulan Desember 2022, kabinet Kishida mengambil Langkah besar dalam mengajukan sebuah kebijakan baru Jepang dalam urusan anggaran pertahanan militer pada tahun 2023 sebesar 26,3% dari tahun ke tahun. Anggaran baru ini memperjelas Kishida dalam menepati janjinya untuk meningkatkan pengadaaan anggaran pertahanan Jepang menjadi 2% dari *Produk Domestic Bruto* Jepang (PDB). Yang di mana anggaran pertahanan Jepang pada tahun 2023 itu lebih besar, yaitu sekitar 6,8 triliun yen (51,4 miliar USD), fokus Jepang dalam kebijakan ini untuk meningkatkan sebuah persenjataan baru dan membangun militer yang tidak hanya memiliki perlengkapan yang baik, namun juga awak yang lebih baik.

Ini merupakan langkah awal Jepang sebagai pencegahan terhadap kekhawatirannya dengan menciptakan kebijakannya masuk ke dalam *National Security Strategy* Jepang atau (NSS) (Felix K. Chang, 2023).

Diperkuat dengan argumen yang dikeluarkan oleh menteri pertahanan Jepang Nobuo Kishi “*We must increase our defence capabilities at a radically different pace than in the past*”, yang diucapkan pada 19 Mei 2021. Argumen Kishi ini di susul dengan kebijakan peningkatan belanja pertahanan Jepang selama Sembilan tahun sebagai respons Jepang terhadap modernisasi militer Cina, serta pernyataan klaim teritorial yang semakin agresif di Laut Cina Timur, serangan rutin yang dilakukan Cina dan Rusia masuk pada wilayah udara Jepang, serta ancaman yang ditimbulkan dari kepemilikan rudal Korea Utara. Pemerintahan perdana menteri Fumio Kishida akan menghapus batas permintaan belanja pertahanan untuk tahun fiskal mendatang, sehingga membuka jalan bagi Jepang dalam peningkatan dramatis dalam belanja militer. Hal inilah yang membuat Kishida akan menyetujui kebijakan tersebut sebelum akhir Juli 2022 (GlobalSecurity.org, 2021).

Namun dengan adanya artikel 9 yang merupakan sebuah peraturan yang di buat oleh pemerintah Jepang setelah berakhirnya perang dunia 2, yang menjadikan Jepang merupakan negara pasifis, Yaitu usaha Jepang untuk tidak mempertahankan militer tradisionalnya serta peperangan bukan sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Diberlakukannya peraturan ini mengakibatkan Jepang sebagai negara yang tidak memiliki Angkatan bersenjata formal seperti negara-negara lain. Akan tetapi, Jepang tetap memiliki sebuah angkatan bersenjata yang berdedikasi untuk melindungi wilayahnya, (JSDF)

memiliki tugas untuk mempertahankan wilayah Jepang dan hanya beroperasi di wilayah Jepang saja (Nasu, 2004).

Tetapi pada masa ke pemerintahan Shinzo Abe, Abe berusaha untuk meminta persetujuan masyarakat Jepang agar konstitusi 9 dapat di amendemenkan. Namun, hingga saat ini amendemen konstitusi 9 belum mendapat persetujuan masyarakat Jepang tetapi, perdana menteri baru Fumio Kishida berusaha untuk mengubah kapabilitas (JSDF), yang awalnya militer (JSDF) hanya sekedar mencegah sebuah konflik, namun akhirnya menjadikan tentara (JSDF) untuk bisa memberikan sebuah serangan dalam melawan ancaman dari negara tetangganya. Perubahan kapabilitas ini dibarengi oleh desakan yang dilakukan mantan perdana menteri Shinzo Abe, yang mana dia menjelaskan bahwa (JSDF) harus dapat melindungi kedaulatan Jepang. Serta desakan dari terjadinya sebuah konflik dengan Cina di Laut Cina Timur dalam sengketa Pulau Senkaku atau menurut Cina pulau Diaoyu (Pramaiseilla, 2023).

Maka berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat sebuah fenomena ini dalam penelitian yang berjudul **Kebijakan Jepang melalui *National Security Strategy* (NSS) dalam Menjaga Stabilitas di Laut Cina Timur pada Tahun 2020 – 2022.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi, serta kendala masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dan rumusan masalah yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, “**Bagaimana Implikasi Kebijakan Jepang melalui *National***

Security Strategy (NSS) dalam Upaya Menjaga Kestabilan Keamanan Di Laut Cina Timur?

1.3. Pembatas Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan, maka penelitian haruslah di persempit, sehingga penelitian ini akan lebih tepat sasaran. Peneliti menetapkan pembatasan masalah menjadi 2 bagian, diantaranya

1. Aktor. Pada penelitian ini, meskipun banyak sekali aktor yang terlibat, tetapi peneliti berusaha akan memfokuskan salah satu aktor yaitu. Cina dan Jepang. Jepang merupakan aktor utama dalam penelitian ini, karena Jepang merupakan sebuah aktor yang menjaga kestabilan regional Asia Timur dengan mengeluarkan kebijakan peningkatan anggaran pertahanan baru.
2. Periodisasi. Penelitian dibatasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023, yaitu sejak masalah muncul dan dikeluarkannya sebuah kebijakan pertahanan Jepang dalam mencegah masalah yang terjadi.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dari masalah yang ada, dinyatakan ke dalam beberapa bagian

1. Untuk mengetahui kebijakan keamanan Jepang melalui *National Security Strategy (NSS)*, *National Defense Strategy (NDS)*, dan *Defense Buildup Program (DBP)*.
2. Untuk mengetahui keamanan Kawasan di Laut Cina Timur

3. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan (NSS) Jepang dalam menjaga kestabilan di Kawasan Laut Cina Timur.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Menjadi sebuah referensi dari bahan pemikiran dan penelitian ilmiah untuk penelitian selanjutnya
2. Melengkapi persyaratan gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung dengan menghasilkan karya ilmiah yang merupakan sebuah salah satu syarat kelulusan